

RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN KOMBENG



TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Renja Kecamatan Kombeng Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen ini berfungsi sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kombeng serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk tahun anggaran 2026 melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI.

Penyusunan Renja ini menitikberatkan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan desa, serta optimalisasi pembangunan di wilayah Kecamatan Kombeng guna mendukung visi besar Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Kami menyadari bahwa tantangan pembangunan di wilayah hulu memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan partisipasi aktif masyarakat.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi memberikan masukan, data, dan saran dalam penyusunan dokumen ini, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan. Semoga Rencana Kerja Kecamatan Kombeng Tahun 2026 ini dapat diimplementasikan dengan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Kombeng.



Camat Kombeng,

IRAN, S.E., M.Si
Pembina TK./IV.a

NIP.19731012 201001 1 004

Daftar isi

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Daftar tabel	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Kinerja	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra	4
2.2 Analisis kinerja Perangkat Daerah	8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi	10
2.4 Analisis Kinerja dan Tindak Lanjut	14
2.5 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	17
BAB III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah	25
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	25
3.2 Tujuan dan Sasaran Tahun 2026	26
3.3 Isu Strategis Pembangunan Kecamatan Kombeng	31
3.4 Analisis Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Isu Strategis	32
3.5 Arah kebijakan Pembangunan Kecamatan Kombeng Tahun 2026	33
3.6 Strategi Pencapaian	36
BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah	39
4.1 Arah Umum Rencana Kerja Tahun 2026	39
4.2 Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Indikator Kinerja Tahun 2026	39
BAB V Penutup	51
5.1 Catatan Penting Pelaksanaan	51
5.2 Kaidah Pelaksanaan	51
5.3 Rencana Tindak Lanjut	52

Daftar Tabel

Tabel T-C 29	7
Tabel T-C 30	8
Tabel 2.2	9
Tabel T-C 31	18
Tabel 3.3	31
Tabel 3.4	32
Tabel 3.5	35
Tabel T-C 33	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kombeng Tahun 2026 merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Renja ini disusun sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kombeng Tahun 2025–2029 dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025–2029.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi koordinatif di wilayah kecamatan, Kecamatan Kombeng berperan penting dalam memastikan keterpaduan antara kebijakan pemerintah daerah dengan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa dan masyarakat. Melalui dokumen Renja ini, dirumuskan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Penyusunan Renja Kecamatan Kombeng Tahun 2026 dilakukan dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politikal, top-down dan bottom-up, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Prosesnya dimulai dari evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025, identifikasi isu strategis kecamatan, hingga perumusan prioritas dan kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan.

Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Kecamatan Kombeng, sekaligus menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kecamatan Kombeng Tahun 2026 berpedoman pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang RPJPD dan RPJMD;
10. Dokumen Renstra Kecamatan Kombeng Tahun 2025–2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Renja Kecamatan Kombeng Tahun 2026 disusun sebagai pedoman dan arah kebijakan pembangunan tahunan Kecamatan yang selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Timur serta mendukung pencapaian sasaran strategis dalam Renstra Kecamatan 2025–2029.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja ini adalah:

1. Menjabarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan kecamatan dalam program dan kegiatan tahun 2026;
2. Menyediakan acuan bagi penyusunan RKA dan DPA Kecamatan Kombeng Tahun 2026;
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan melalui koordinasi lintas sektor dan sinergi dengan pemerintah desa serta masyarakat;
4. Mengintegrasikan hasil Musrenbang Kecamatan ke dalam rencana kerja pemerintah daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari Rencana Kerja Kantor Kecamatan Kombeng Tahun 2025 sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis kinerja Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi
- 2.4 Analisis Kinerja dan Tindak Lanjut
- 2.5 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Isu Strategis Pembangunan Kecamatan Kombeng
- 3.4 Analisis Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Isu Strategis
- 3.5 Arah kebijakan Pembangunan Kecamatan Kombeng Tahun 2026
- 3.6 Strategi Pencapaian

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Arah Umum Rencana Kerja Tahun 2026
- 4.2 Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Indikator Kinerja Tahun 2026

BAB V PENUTUP

- 5.1 Catatan Penting Pelaksanaan
- 5.2 Kaidah Pelaksanaan
- 5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025 DAN CAPAIAN KINERJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kombeng Tahun 2025 bertujuan untuk menilai sejauh mana program dan kegiatan yang telah dilaksanakan mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Kombeng Tahun 2025–2029 serta RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025. Evaluasi dilakukan melalui pendekatan hasil (outcome) dan kinerja (performance-based evaluation) yang mengacu pada indikator kinerja utama (IKU).

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 secara umum telah berjalan sesuai rencana, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan pada tahun 2026. Faktor-faktor penghambat antara lain keterbatasan sumber daya manusia, keterlambatan penyaluran anggaran akibat pergeseran anggaran atau efisiensi, serta kondisi geografis wilayah yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan lapangan.

Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Kombeng pada tahun 2025 masih berada pada kategori baik, 87,8 % pada triwulan III dari tahun 2025. Beberapa capaian penting di antaranya peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, serta peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Kecamatan Kombeng adalah salah satu OPD yang telah mengacu pada PERMENDAGRI 90 Tahun 2019, yang melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pemerintahan dengan 6 (enam) Program, beserta Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercakup di dalamnya.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 8 (Delapan) Kegiatan dan 21 (Dua Puluh Satu) Sub Kegiatan, dengan realisasi anggaran sebesar 90,05%.

Indikator programnya adalah Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan

Keberlanjutan : Meningkatnya kualitas pengetahuan aparatur dalam mengoperasikan fasilitas teknologi dan mempermudah akses informasi serta publikasi data terkait kegiatan Kecamatan, Anggaran dan informasi lainnya. ada Koordinasi antar Kecamatan dan Desa dalam hal Pelayanan tertib Administrasi.

Hambatan : Kurangnya sarana dan prasarana Teknologi serta ketersediaan SDM yang mengakibatkan overlod pekerjaan masing masing staf.

Pendorong : Tingginya rasa tanggung jawab aparatur dan deatline penyelesaian tugas atau pekerjaan sesuai ketentuan waktu.

2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan 2 (Dua) Kegiatan, dan 3 (Tiga) Sub Kegiatan, dengan realisasi anggaran sebesar 55,32%.

Indikator Programnya adalah Jumlah jumlah Pelanggaran Perda/Perkada,.

Pendorong : Adanya komitmen kecamatan untuk lebih meningkatkan upaya harmonisasi hubungan antara tokoh agama dan tokoh masyarakat di wilayah kecamatan Kombeng.

Keberlanjutan : Dengan adanya upaya koordinasi dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat, sehingga dapat tercapai kodusifitas di wilayah kecamatan Kombeng.

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan, dengan realisasi anggaran sebesar 76,18%.

Indikator Programnya adalah jumlah Pembinaan Wawasan dan Ketahanan Nasional yang dilaksanakan

Pendorong : Adanya Komitmen Kecamatan untuk lebih meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan dan pembinaan kerukunan antar umat beragama demi terwujudnya keutuhan dan kesatuan, serta tercapainya stabilitas baik lokal, regional maupun nasional.

Keberlanjutan : Ada Koordinasi peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan dan pembinaan antar umat beragama, baik antar Kecamatan dan desa-desa serta instansi terkait.

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Desa, dengan 1 (satu) Kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan, dengan realisasi Anggaran sebesar 68,38%

Indikator programnya adalah : Cakupan Fasilitas Pembinaan, Pengawasan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan

5. Program Pemerintahan dan pelayanan Publik dengan 4 (Empat) Kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar 76,63%.

Indikator programnya adalah :jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan kecamatan.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

Fasilitasi Penerbitan Layanan Perijinan dan pengurusan administrasi Kependudukan.

Indikator output kegiatannya adalah Jumlah ijin dan e-KTP yang diterbitkan. Penerbitan Ijin dan e-KTP sesuai Peraturan,

Pendorong : Adanya Perubahan Aturan yang membutuhkan Aparatur untuk cepat dalam menyesuaikan Pelayanan Publik

Hambatan : Minimnya ketersediaan Fasilitas Laptop/komputer dan cara Pengoperasiannya dan Kurangnya SDA tentang IT

Keberlanjutan : Ada Koordinasi antar Kecamatan, dan Desa dalam hal Pembahasan Pelayanan Publik, semakin terbangunnya Konsistensi Transparansi penggunaan Anggaran

6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan 2 (dua) Kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar 50,76%.

Indikator programnya adalah : jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam musyawarah pembangunan.

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah Kecamatan Kombeng Tahun 2023 Kabupaten Kutai Timur

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Laporan Keuangan	90%	100%	92%	92%	80%	100%	97%	97%
	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada	0 pelanggaran	0 pelanggaran	0 pelanggaran	0 Pelanggaran	80%	0 pelanggaran	0 pelanggaran	100%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Cakupan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	90%	85%	94%	90%	90%	100%	96%	96%
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	91%	100%	93%	100%	100%	100%	100%	100%
q	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	10 layanan	10 layanan	12 layanan	12 layanan	60%	15 layanan	15 layanan	86,67%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5 kegiatan	5 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	90%	9 kegiatan	9 kegiatan	100%

Catatan: secara keseluruhan capaian rata-rata target RENSTRA kecamatan Kombeng tahun ke-V pada tahun 2025 adalah sebesar 89 %

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatifnya menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut.

Tabel T.C. 30
Pencapaian Kinerja PD Kecamatan Kombeng

No	IKU	SPM/Standar Nasional		IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cat. Analisis
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	4	5	8	9	4	5	7	5	
2	Nilai SAKIP	-	Persentase peningkatan rekomendasi, hasil koordinasi bidang pemerintahan, bidang ketentaraman dan ketertiban, perekonomian dan kesejahteraan social, yang ditindak lanjuti dalam	-			49,00	50,00		47,70	48,60		Belum dapat ditampilkan karena belum ada nilai dari instansi terkait
3	Indek Pembangunan Desa	-	Persentase peningkatan desa dengan administrasi berkualitas baik	-	68,11	69,72	71,32	72,93	68,11	69,72	71,32		Belum dapat ditampilkan karena belum ada nilai dari instansi terkait
3.1 Indek Kepuasan Masyarakat					72	75,87	75,9	75,93	75,95				SKM dilaksanakan berdasarkan Permenpan RB nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat

Tabel 2.2 - Capaian Kinerja Program Tahun 2025

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik kec. Kombeng	15 pelayanan	15 pelayanan	100%	Penyelenggaraan pelayanan diambil alih oleh instansi teknis
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan Kombeng	100 %	95 %	95%	Tingkat partisipasi desa meningkat
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA di Kecamatan Kombeng	0 pelanggaran	0 pelanggaran	100 %	Respons cepat meningkat berkat koordinasi Babinsa dan Bhabinkamtibmas
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di kec. Kombeng	9 kegiatan	9 kegiatan	100%	Satu kegiatan pembinaan tidak dapat dilaksanakan akibat efisiensi anggaran
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitas Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kombeng	100%	100 %	100%	Perlu peningkatan koordinasi dengan desa dan lembaga/organisasi masyarakat
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kec. Kombeng	100 %	97 %	97%	Masih terdapat kendala jaringan administrasi online

Secara umum, dari hasil evaluasi tersebut, rata-rata capaian kinerja Kecamatan Kombeng Tahun 2025 mencapai sekitar 89 % dari target yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan kinerja yang cukup baik meskipun masih diperlukan optimalisasi pada aspek koordinasi antar pihak dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 47 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, serta Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah, ditetapkan tugas kecamatan adalah :

- a. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
- b. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi kecamatan adalah :

- a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan perundangan- undangan;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Pelaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa atau kelurahan.

Dari uraian di atas dapat diketahui kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan disamping harus memfasilitasi tugas dari SKPD-SKPD yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi desa. Hal ini bisa terlaksana dengan baik bila didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya masih perlu ditingkatkan lagi. Disamping itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka diharapkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan dasar publik harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan.

Faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Succes Factors) merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan keberhasilan Kecamatan Kombeng. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam

menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan, sehingga lebih efisien dan efektif.

Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Kombeng. Dari hasil analisis jabatan yang dilakukan, jumlah pegawai yang seharusnya ada di kecamatan sekitar 58 (lima puluh delapan) orang sementara keadaan riil yang ada jumlah pegawai hanya sejumlah 30 (tiga puluh) orang untuk menangani semua bidang yang ada. Selain itu keterbatasan dana juga menjadi hambatan. Dana yang ada sebagian besar masih terkonsentrasi untuk kegiatan rutin sehingga kegiatan utama belum dapat optimal karena pagu dana yang kecil.

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dihadapkan pada beberapa tantangan signifikan yang berpotensi menghambat pencapaian target kinerja. Permasalahan dan hambatan utama tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): Jumlah aparatur pemerintahan desa yang tersedia dinilai masih terbatas dibandingkan dengan luas wilayah kerja dan kompleksitas beban administrasi pemerintahan desa. Hal ini mengakibatkan terjadinya penumpukan tugas dan potensi penurunan efektivitas serta kualitas kinerja aparatur.

Kesenjangan antara jumlah aparatur yang ada dengan volume pekerjaan, luas cakupan wilayah, serta keragaman tugas administratif dan pembangunan sangat tinggi. Struktur organisasi yang ramping dan keterbatasan alokasi formasi menyebabkan setiap individu aparatur harus memegang beberapa fungsi sekaligus.

Dampak:

- Beban Kerja Berlebih: Aparatur mengalami kelelahan (burnout) dan penurunan fokus, yang berpotensi meningkatkan risiko kesalahan administrasi.
- Kurangnya Spesialisasi: Sulit untuk mengembangkan keahlian spesifik yang dibutuhkan (misalnya dalam bidang teknologi informasi, perencanaan anggaran, atau tata ruang desa).
- Pelayanan Sub-Optimal: Kecepatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi terhambat karena keterbatasan tenaga pelaksana

2. Keterlambatan Penyaluran Anggaran: Terjadi keterlambatan dalam proses penyesuaian sistem anggaran pada awal tahun fiskal. Kondisi ini secara langsung menyebabkan tertundanya realisasi pelaksanaan kegiatan strategis pada triwulan pertama dan kedua (Januari–Juni), yang pada gilirannya dapat memengaruhi jadwal kerja dan pencapaian target akhir tahun secara keseluruhan.

Transisi atau penyesuaian terhadap sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang baru (baik dari sisi regulasi maupun teknologi) seringkali memerlukan waktu adaptasi. Proses verifikasi, validasi, dan pencairan dana di tingkat pusat atau daerah sering mengalami penundaan di awal tahun.

Dampak:

- Penundaan Program Kritis: Kegiatan yang bersifat mendesak atau yang seharusnya dimulai sejak awal tahun (seperti pengadaan awal, sosialisasi, atau pekerjaan fisik yang tergantung musim) menjadi tertunda.
 - Penyerapan Anggaran Tidak Merata: Konsentrasi penyerapan anggaran terakumulasi pada triwulan III dan IV, yang dapat memengaruhi kualitas pengawasan dan pelaksanaan pekerjaan.
 - Hambatan Kontrak: Potensi kesulitan dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa tepat waktu sesuai perencanaan
3. Kondisi Geografis dan Infrastruktur: Aksesibilitas antar desa masih merupakan tantangan utama. Kondisi jalan yang sulit dijangkau, terutama pada musim hujan, menjadi hambatan serius. Situasi ini berdampak negatif terhadap mobilitas aparatur dan logistik, sehingga memengaruhi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan lapangan serta pelayanan publik.

Karakteristik geografis wilayah yang didominasi perbukitan, sungai, atau daerah terpencil, ditambah dengan kondisi infrastruktur jalan yang belum terbangun sempurna atau rentan rusak (terutama saat intensitas hujan tinggi), menciptakan kendala besar

Dampak:

- Isolasi Sementara: Beberapa desa dapat terisolasi penuh selama musim hujan, menghambat komunikasi, distribusi logistik, dan kunjungan kerja.

- Peningkatan Biaya dan Waktu Operasional: Waktu tempuh perjalanan menjadi lebih lama, risiko kecelakaan meningkat, dan biaya pemeliharaan kendaraan operasional melonjak tinggi.
 - Keterlambatan Proyek Fisik: Proyek pembangunan infrastruktur fisik terpaksa dihentikan atau kualitasnya menurun akibat kondisi lapangan yang tidak ideal.
4. Partisipasi Masyarakat: Meskipun tren partisipasi masyarakat menunjukkan peningkatan, tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi pembangunan masih memerlukan upaya peningkatan. Partisipasi yang optimal dalam evaluasi sangat krusial untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar relevan dengan kebutuhan riil di lapangan.

Meskipun masyarakat aktif dalam tahap perencanaan (Musrenbang), tingkat keterlibatan mereka dalam tahap pengawasan dan evaluasi program yang sudah berjalan masih relatif rendah. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya evaluasi atau minimnya kanal yang mudah diakses untuk menyampaikan masukan dan kritik konstruktif.

Dampak:

- Kurangnya Akuntabilitas: Proses evaluasi menjadi kurang objektif dan komprehensif tanpa masukan langsung dari penerima manfaat program.
 - Risiko Ketidaktepatan Sasaran: Pemerintah desa kehilangan peluang untuk mengidentifikasi kekurangan program secara dini, sehingga berpotensi mengulang kesalahan yang sama pada periode perencanaan berikutnya
5. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Kerja: Ketersediaan peralatan administrasi dan kendaraan operasional belum memadai. Keterbatasan ini menjadi hambatan fungsional dalam mendukung kelancaran kegiatan sehari-hari serta mobilitas lapangan, sehingga menghambat upaya untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat

Aset pemerintah terutama yang bersifat teknis dan administrasi (misalnya komputer, perangkat jaringan, server data, dan peralatan kantor), banyak yang tidak memenuhi standar kinerja saat ini. Demikian pula dengan jumlah dan kondisi kendaraan operasional untuk mobilitas aparatur.

Dampak:

- **Inefisiensi Administrasi:** Penggunaan peralatan lama memperlambat proses dokumentasi, pengarsipan, dan pelaporan, yang memengaruhi kecepatan pelayanan publik.
- **Keterbatasan Mobilitas:** Sulitnya mencapai lokasi kegiatan dan menjangkau masyarakat di pelosok desa secara rutin akibat minimnya dukungan kendaraan operasional yang layak.

2.4 Analisis Kinerja dan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi tindak lanjut strategis untuk penyusunan Renja Tahun 2026. Poin-poin tindak lanjut ini muncul sebagai respons terhadap temuan (hasil analisis) bahwa kinerja tahun 2025 belum optimal, karena adanya hambatan seperti proses administrasi yang lambat, SDM yang kurang siap digital, koordinasi yang lemah, atau target anggaran yang tidak tercapai.

1. Penguatan Kapasitas Aparatur Kecamatan melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi pelayanan publik berbasis digital

Analisis Masalah Kinerja 2025:

Ditemukan bahwa waktu tunggu pelayanan publik (misalnya pengurusan KTP/KK/Surat Izin) masih tinggi. Hal ini disebabkan oleh minimnya literasi digital di kalangan staf kecamatan dan penggunaan sistem manual yang memakan waktu.

Tindak Lanjut (Solusi 2026):

- **Aksi Nyata:** Mengadakan program pelatihan intensif (bimtek/workshop) mengenai sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK), e-Government, atau command center tingkat kecamatan.
- **Target Hasil:** Peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, penurunan waktu rata-rata penyelesaian dokumen, dan staf yang lebih mahir menggunakan aplikasi digital.
- **Hubungan dengan Renja 2026:** Kegiatan ini akan masuk dalam program kerja dan anggaran Bagian Umum dan Kepegawaian di Renja 2026.

2. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mempercepat proses administrasi dan pelaporan.

Analisis Masalah Kinerja 2025:

Pelaporan dari desa ke kecamatan atau dari kecamatan ke kabupaten sering terlambat dan tidak akurat karena masih menggunakan hardcopy atau email yang tidak terpusat. Infrastruktur IT di kantor kecamatan kurang memadai.

Tindak Lanjut (Solusi 2026):

- Aksi Nyata: Menganggarkan pengadaan perangkat keras (komputer/server) yang lebih baik, implementasi satu platform aplikasi pelaporan terpadu (misalnya Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Terintegrasi), dan memastikan koneksi internet yang stabil di seluruh area kantor.
- Target Hasil: Proses administrasi internal lebih cepat, pelaporan tepat waktu, dan data yang lebih akurat tersedia secara real-time.
- Hubungan dengan Renja 2026: Alokasi anggaran untuk belanja modal IT dan pengembangan aplikasi di Renja 2026.

3. Perencanaan Anggaran yang Lebih Realistis dengan memperhatikan kebutuhan prioritas dan kemampuan keuangan daerah

Analisis Masalah Kinerja 2025:

Banyak program di tahun 2025 yang terealisasi secara fisik namun penyerapan anggarannya sangat rendah (SilPA tinggi), atau sebaliknya, ada kegiatan prioritas yang anggarannya kurang. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan awal dan realisasi keuangan daerah.

Tindak Lanjut (Solusi 2026):

- Aksi Nyata: Melakukan desk evaluasi anggaran secara ketat sebelum pengesahan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) 2026. Menggunakan pendekatan zero-based budgeting untuk memastikan setiap rupiah dibelanjakan untuk kegiatan yang benar-benar prioritas.
- Target Hasil: Tingkat penyerapan anggaran yang lebih tinggi dan proporsional (misalnya mencapai 95%), serta minimnya revisi anggaran di tengah tahun berjalan.

- Hubungan dengan Renja 2026: Perubahan metodologi dalam penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) dan Perjanjian Kinerja tahun 2026.
4. Peningkatan Koordinasi dengan Pemerintah Desa agar kegiatan kecamatan lebih sinergis dengan kebutuhan masyarakat desa

Analisis Masalah Kinerja 2025:

Terdapat program kecamatan (misalnya pembangunan infrastruktur A) yang tumpang tindih atau tidak sesuai dengan prioritas pembangunan yang sudah direncanakan oleh desa (Dana Desa).

Tindak Lanjut (Solusi 2026):

- Aksi Nyata: Mengintensifkan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tingkat kecamatan dengan melibatkan kepala desa, BPD, dan tokoh masyarakat secara aktif. Membentuk forum komunikasi rutin antara Camat dan Kepala Desa.
 - Target Hasil: Terwujudnya program kerja yang saling melengkapi antara kecamatan dan desa, meningkatnya rasa kepemilikan masyarakat terhadap program pemerintah daerah, dan efektivitas belanja pembangunan.
 - Hubungan dengan Renja 2026: Pencantuman kegiatan fasilitasi forum koordinasi dan sinkronisasi program di tingkat desa/kecamatan.
5. Pemantapan Mekanisme Monitoring dan Evaluasi agar pelaksanaan kegiatan dapat terukur dan terarah sesuai sasaran

Analisis Masalah Kinerja 2025:

Proses pengawasan pelaksanaan kegiatan di lapangan lemah. Kegiatan berjalan tanpa milestone yang jelas, dan ketika ada masalah, instansi lambat dalam mengambil keputusan korektif.

Tindak Lanjut (Solusi 2026):

- Aksi Nyata: Menerapkan jadwal monitoring berkala (triwulanan atau bulanan) yang wajib didokumentasikan dan dilaporkan. Menggunakan dashboard kinerja berbasis IT untuk memantau progres secara real-time.
- Target Hasil: Pengendalian internal yang lebih kuat, identifikasi dini terhadap risiko kegagalan program, dan manajemen responsif terhadap perubahan kondisi lapangan.

- Hubungan dengan Renja 2026: Penguatan peran Inspektorat Pembantu atau tim monev internal di tingkat kecamatan, dengan anggaran yang memadai untuk kegiatan pengawasan.

2.5 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat : a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Kombeng berdasarkan RKPD Kabupaten Kutai Timur sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Kutai Timur yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Kombeng. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di SKPD Kecamatan Kombeng Rancangan Awal RKPDnya adalah Renja dan Hasil Analisis Kebutuhannya adalah DPA sehingga dapat dibandingkan antara renja dengan DPA apakah ada perubahan baik program/kegiatan, lokasi maupun besaran anggarannya. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kecamatan Kombeng, dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel T-C. 31
Review terhadap rancangan awal Renja Kecamatan Kombeng Tahun 2026

No	Kode	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan		Lokasi
		Program/Kegiatan	Indikator Capaian/ Program/ Kegiatan.Sub Kegiatan	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		KANTOR CAMAT KOMBENG				7.632.049.173,00		6.537.947.200,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			7.632.049.173,00			6.537.947.200,00	
	7.01	KECAMATAN			7.632.049.173,00			6.537.947.200,00	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip IP ASN / Indeks profesionalitas ASN	55 80	6.932.049.173,00		50 % 77	5.634.532.200,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	70.000.000,00		6 Dokumen	33.340.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Dokumen	16.510.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	16.830.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7 Laporan	5.992.049.173,00		2 Laporan	5.085.602.200,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	5.932.049.173,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	49 Orang/bulan	5.037.947.200,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	39.240.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	8.415.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6 Laporan	25.000.000,00		6 Laporan	8.415.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	8.415.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Laporan	50.000.000,00		3 Laporan	20.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai							
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	10.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							

[illegible]

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 Laporan	54.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	54.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	186.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	156.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1 Laporan	50.000.000,00		1 Laporan	23.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	11 Unit	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	13.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya							
			<i>Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara</i>	4 Unit	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Unit	10.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
2,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Persentase Masyarakat yang dilayani</i>	76 %	80.000.000,00		76 %	40.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	1 Laporan	60.000.000,00		1 Laporan	30.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							

			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	3 Laporan	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Laporan	30.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</i>	1 Laporan	20.000.000,00		1 Laporan	10.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan							
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan</i>	1 Laporan	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	10.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
3,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir</i>	74 %	280.000.000,00		74 %	570.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	1 Laporan	80.000.000,00		1 Laporan	70.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	8 Lembaga K emasyarakat an	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8 Lembaga K emasyarakat an	50.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	2 Laporan	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	20.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	1 Laporan	200.000.000,00		4 Laporan	500.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG

7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara							
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	200 Keluarga	65.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	200 Keluarga	150.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga							
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	200 Keluarga	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah							
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	200 Keluarga	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	400 Keluarga	100.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing							
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	400 Keluarga	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	300 Keluarga	100.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG

	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat							
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</i>	200 Keluarga	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	200 Keluarga	150.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
4,	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	60.000.000,00		100 %	28.415.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	1 Laporan	60.000.000,00		1 Laporan	28.415.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	1 Laporan	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	20.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat							
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	1 Laporan	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	8.415.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
5,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan	73 %	190.000.000,00		73 %	220.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah "</i>	1 Laporan	190.000.000,00		3 Laporan	220.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG

	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	750 Orang	130.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	300 Orang	160.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional							
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional</i>	80 Orang	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	80 Orang	50.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
			<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	1 Dokumen	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	10.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
6,	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik</i>	77 %	90.000.000,00		76 %	45.000.000,00	

7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Laporan	90.000.000,00		3 Laporan	45.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa							
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7 Dokumen	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	5.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa							
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 Dokumen	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	10.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7 Dokumen	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	20.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan					-		
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	10.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
J U M L A H				7.632.049.173,00			6.537.947.200,00	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) [Nama Perangkat Daerah] Tahun 2026 disusun dengan senantiasa mengacu pada arah kebijakan nasional guna menjamin terciptanya sinergitas pembangunan yang linear dari tingkat pusat hingga daerah. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, terdapat beberapa poin krusial yang menjadi landasan operasional perangkat daerah, antara lain:

1) **Percepatan Penurunan Stunting (Integrasi Intervensi Spesifik dan Sensitif)**

Kebijakan nasional tahun 2026 tetap menempatkan penurunan prevalensi stunting sebagai prioritas utama untuk mewujudkan SDM unggul. Berdasarkan telaah kebijakan nasional, kecamatan Kombeng mengintegrasikan langkah-langkah berikut ke dalam Renja 2026:

- **Penyelarasan Lokus:** Penentuan lokasi fokus (lokus) intervensi dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa disesuaikan dengan data sebaran stunting terbaru yang dirilis pemerintah pusat.
- **Penguatan Ketahanan Pangan dan Sanitasi:** Melalui kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, perangkat daerah berkomitmen mendukung intervensi sensitif melalui penyediaan akses air minum, sanitasi layak, dan edukasi gizi bagi keluarga berisiko stunting di tingkat desa/kelurahan.
- **Kolaborasi Multisektor:** Memastikan penganggaran tahun 2026 mendukung kerja sama dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) agar terjadi sinkronisasi data dan tindakan di lapangan.

2) **Penghapusan Kemiskinan Ekstrem**

Menindaklanjuti Instruksi Presiden terkait Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE), kebijakan nasional tahun 2026 menekankan pada ketepatan sasaran dan keterpaduan program. Telaah kebijakan nasional ini diimplementasikan dalam Renja melalui:

- Pemanfaatan Data P3KE: Strategi pengentasan kemiskinan dalam Renja 2026 wajib merujuk pada Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) guna memastikan bantuan dan program pemberdayaan tepat sasaran (By Name By Address).
 - Peningkatan Pendapatan Masyarakat: Program pemberdayaan ekonomi dan pelatihan keterampilan kerja diarahkan untuk membuka peluang usaha baru bagi rumah tangga miskin, sehingga mampu keluar dari zona kemiskinan secara mandiri.
- 3) Penyelarasan Agenda Transformasi Ekonomi
- Sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, kebijakan nasional tahun 2026 difokuskan pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kecamatan Kombeng merespons kebijakan ini melalui program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing lokal dan produktivitas tenaga kerja di daerah.
- 4) Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah terkait terus menekankan penguatan SPM sebagai pilar utama pelayanan publik. Oleh karena itu, Renja 2026 mengalokasikan sumber daya secara prioritas untuk memastikan bahwa indikator-indikator pelayanan dasar, khususnya dalam bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik dapat memenuhi target nasional yang telah ditetapkan.
- 5) Digitalisasi Birokrasi (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik - SPBE)
- Sesuai dengan arahan kebijakan nasional mengenai penguatan ekosistem digital, kecamatan Kombeng melakukan telaah terhadap integrasi sistem informasi. Penggunaan aplikasi SIPD-RI dalam proses perencanaan dan penganggaran tahun 2026 merupakan wujud nyata kepatuhan terhadap kebijakan pusat untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi secara nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Tahun 2026

Tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Kombeng Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025, serta memperhatikan arah kebijakan RPJMD dan Renstra Kecamatan 2025–2029. Tujuan ini menggambarkan kondisi yang ingin dicapai

pada tahun 2026, sedangkan sasaran merupakan hasil terukur dari pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan tersebut.

A. Tujuan

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui implementasi penuh reformasi birokrasi di tingkat kecamatan dan desa.

Tujuan ini merupakan payung besar yang mencakup perubahan mendasar dalam cara kerja pemerintahan di Kecamatan Kombeng. Penjabaran mendalamnya mencakup:

- Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja: RB bukan sekadar perubahan administrasi, melainkan transformasi budaya kerja dari mentalitas "dilayani" menjadi "melayani". Ini melibatkan komitmen seluruh jajaran ASN untuk bekerja secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil.
 - Penyederhanaan Proses Bisnis: Menganalisis dan memangkas alur birokrasi yang panjang dan berbelit, khususnya pada layanan perizinan dan administrasi dasar, dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan kecepatan.
 - Penataan Kelembagaan: Mengkaji ulang struktur organisasi di tingkat kecamatan dan desa agar lebih ramping, kaya fungsi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal, menghindari tumpang tindih tugas pokok dan fungsi (Tupoksi).
2. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta aparatur desa agar mampu memberikan pelayanan prima.

Tujuan ini menekankan pentingnya investasi pada sumber daya manusia (SDM) pemerintahan, yang merupakan aset utama dalam pelayanan publik. Penjabaran mendalamnya mencakup:

- Manajemen Talenta Berbasis Kinerja: Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan spesifik berdasarkan evaluasi kinerja individu, bukan sekadar pelatihan massal yang generik. Fokus pelatihan adalah keterampilan teknis (misalnya, TIK, pengelolaan keuangan) dan soft skills (komunikasi publik, problem solving).
- Pemerataan Kompetensi: Memastikan bahwa peningkatan kompetensi tidak hanya terjadi di kantor kecamatan, tetapi juga merata di seluruh desa, terutama bagi aparatur yang bertugas di wilayah terpencil dengan akses terbatas.
- Sistem Penghargaan dan Sanksi: Menerapkan sistem penghargaan bagi ASN berprestasi dan sanksi tegas bagi yang melanggar disiplin, menciptakan lingkungan kerja yang adil dan memotivasi.

3. Memastikan pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berbasis pada hasil.

Tujuan ini berfokus pada aspek pertanggungjawaban publik. Penjabaran mendalamnya mencakup:

- Penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) secara Holistik: Memastikan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja saling terkait erat. Setiap program harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur.
 - Transparansi Pengelolaan Dana Desa dan APBD: Menyediakan saluran informasi yang mudah diakses publik (seperti baliho, website desa) mengenai alokasi dan realisasi anggaran, mencegah potensi korupsi dan meningkatkan partisipasi pengawasan oleh masyarakat.
 - Penguatan Pengawasan Internal: Meningkatkan efektivitas peran Inspektorat Daerah dan Camat sebagai pengawas internal untuk meminimalisir risiko penyimpangan administrasi dan keuangan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Tujuan ini berfokus pada reformasi birokrasi di tingkat kecamatan dengan mengadopsi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance). Penjabarannya mencakup inisiatif untuk menyederhanakan prosedur administrasi, memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat proses perizinan dan layanan dasar, serta membangun mekanisme pengaduan masyarakat yang efektif dan responsif. Aspek transparansi diwujudkan melalui penyediaan informasi publik yang mudah diakses, sementara akuntabilitas ditingkatkan melalui evaluasi kinerja berbasis bukti.
 5. Memantapkan ketentraman dan ketertiban umum serta koordinasi penanganan permasalahan sosial kemasyarakatan. Stabilitas wilayah merupakan prasyarat mutlak bagi pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kecamatan, Polsek, Koramil, dan lembaga adat setempat. Penjabarannya mencakup program patroli terpadu, penyuluhan hukum, fasilitasi penyelesaian konflik sosial secara musyawarah, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam dan non-alam. Hal ini bertujuan menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh warga Kecamatan Kombeng.
 6. Memperkuat kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dalam pembangunan berbasis potensi lokal. Pembangunan harus dimulai dari level terbawah (desa)

dengan memanfaatkan keunggulan spesifik wilayah, seperti pertanian, perkebunan, atau pariwisata lokal (mengingat lokasi di Kalimantan Timur yang kaya sumber daya alam). Penjabarannya mencakup program pendampingan bagi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), pelatihan kewirausahaan bagi UMKM, serta peningkatan kualitas SDM aparatur desa agar mampu mengelola Dana Desa secara efektif dan partisipatif, mendorong kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan.

7. Meningkatkan efektivitas koordinasi pembangunan antara pemerintah kecamatan, desa, dan lembaga kemasyarakatan. Tujuan ini bersifat koordinatif, memastikan bahwa semua pemangku kepentingan bergerak dalam satu visi yang sama. Penjabarannya mencakup penyelenggaraan forum musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang inklusif, rutinnya rapat koordinasi bulanan, pembentukan gugus tugas lintas sektor untuk isu-isu spesifik, dan pemanfaatan sistem informasi terpadu untuk memonitor progres pembangunan di tiap desa, sehingga menghindari tumpang tindih program dan pemborosan anggaran.

B. Sasaran

Sasaran ini adalah hasil konkret yang akan dicapai pada akhir tahun 2026, yang merupakan manifestasi dari tujuan di atas:

1. Terlaksananya 100% program reformasi birokrasi di seluruh unit kerja Kecamatan Kombeng dan desa, dengan hasil penilaian mandiri mencapai predikat "Baik". Sasaran ini akan diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) yang dievaluasi secara internal maupun eksternal. Pencapaian 100% berarti semua komponen RB (seperti manajemen perubahan, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas) telah diimplementasikan penuh. Predikat "Baik" menjadi standar minimal kualitas yang ditargetkan.
2. Meningkatnya indeks profesionalisme ASN di lingkungan Kecamatan Kombeng sebesar 10% dari tahun sebelumnya, melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi yang relevan. Kenaikan indeks sebesar 10% adalah target kuantitatif yang ambisius namun realistis. Pengukuran ini didasarkan pada data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang mencakup tingkat pendidikan, jenis pelatihan yang diikuti, dan kinerja individu. Target ini menunjukkan komitmen untuk mengatasi isu kompetensi ASN yang belum memadai.
3. Tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan Kecamatan Kombeng dan seluruh desa (100% desa meraih opini WTP),

serta meningkatnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kecamatan. Opini WTP dari BPK adalah standar tertinggi dalam audit keuangan. Mencapai WTP untuk 100% desa menunjukkan keberhasilan pembinaan administrasi keuangan oleh kecamatan. Peningkatan nilai SAKIP menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya mengelola uang dengan benar, tetapi juga menggunakan uang tersebut untuk mencapai target kinerja yang telah direncanakan.

4. Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan dengan tingkat kepuasan masyarakat di atas 90%. Sasaran kuantitatif ini akan dicapai melalui implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas untuk semua jenis layanan di Kantor Camat. Pengukuran kepuasan akan dilakukan secara berkala melalui survei indeks kepuasan masyarakat (IKM). Target 90% menjadi indikator keberhasilan utama dalam mewujudkan birokrasi yang melayani dan berorientasi pada hasil.
5. Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat melalui peningkatan peran linmas dan koordinasi keamanan. Pencapaian sasaran ini diukur dari menurunnya angka kriminalitas dan gangguan ketertiban umum di wilayah kecamatan. Strateginya melibatkan revitalisasi peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) melalui pelatihan rutin dan penyediaan sarana pendukung, serta pengaktifan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling) berbasis komunitas di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan desa.
6. Meningkatnya kapasitas aparatur desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sasaran ini diukur melalui dua aspek: peningkatan kompetensi teknis aparatur desa dalam pengelolaan administrasi dan keuangan, serta indikator partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan siklus pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Keberhasilannya ditandai dengan semakin banyaknya inisiatif pembangunan yang berasal dari aspirasi murni masyarakat desa sendiri.
7. Tersedianya data dan informasi pembangunan kecamatan yang akurat dan terintegrasi. Sasaran ini bersifat fundamental untuk pengambilan kebijakan berbasis data (evidence-based policy). Penjabarannya mencakup pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah (SIMDA) di tingkat kecamatan yang mengintegrasikan data sektoral (kesehatan, pendidikan, ekonomi) dari setiap desa, memastikan ketersediaan data yang mutakhir, valid, dan dapat diakses oleh publik maupun lembaga terkait.

3.3 Isu Strategis Pembangunan Kecamatan Kombeng

Isu strategis merupakan permasalahan utama yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan di wilayah Kecamatan Kombeng. Penentuan isu strategis ini dilakukan melalui analisis hasil evaluasi kinerja, kondisi eksisting wilayah, serta masukan dari Musrenbang Kecamatan.

Tabel 3.3 - Isu Strategis Pembangunan Kecamatan Kombeng Tahun 2026

No	Isu Strategis	Akar Permasalahan	Dampak	Arah Kebijakan / Strategi
Tata Kelola & Pelayanan				
1	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kompetensi ASN, Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	- Belum adanya sistem manajemen talenta. - Resistensi terhadap perubahan sistem kerja lama. - Pelaporan kinerja belum terintegrasi.	- Birokrasi tidak efisien. - Kualitas SDM rendah. - Kinerja organisasi tidak terukur; risiko penyimpangan anggaran tinggi.	- Menerapkan pelatihan berbasis kebutuhan (talent management). - Implementasi SAKIP dan SPBE secara penuh. - Penguatan peran APIP dalam pengawasan internal.
2	Kualitas pelayanan publik belum optimal	Keterbatasan SDM dan sarana pelayanan (kendala jaringan online).	Menurunnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan.	Peningkatan kapasitas aparatur dan digitalisasi layanan kecamatan.
Koordinasi & Partisipasi				
3	Koordinasi pembangunan antar desa belum terintegrasi	- Kurangnya forum komunikasi yang efektif. - Data pembangunan yang tidak terbaru/tumpang tindih.	Program pembangunan tidak sinkron antar wilayah; pemborosan anggaran.	Penguatan mekanisme koordinasi dan pengelolaan data berbasis wilayah (single database).
4	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah	Kurangnya fasilitasi dan informasi pembangunan yang transparan.	Hasil pembangunan desa tidak maksimal dan tidak sesuai kebutuhan masyarakat.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi aktif dalam Musrenbang.
Keamanan & Infrastruktur				
5	Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat belum stabil	Minimnya fasilitas keamanan dan kesadaran hukum masyarakat.	Gangguan sosial dan ketidakharmonisan antar warga (konflik lahan/sosial).	Pembinaan masyarakat dan penguatan fungsi Linmas serta sosialisasi hukum partisipatif.
6	Infrastruktur dasar antar desa belum memadai	Kondisi geografis sulit dan keterbatasan anggaran daerah.	Menghambat mobilitas warga dan pelayanan publik (ekonomi, kesehatan, pendidikan).	Kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan sarana prasarana dasar; advokasi anggaran ke Kabupaten/Provinsi

3.4 Analisis Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Isu Strategis

Analisis keterkaitan antara tujuan, sasaran, dan isu strategis dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja Tahun 2026 memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian arah pembangunan kecamatan dan daerah.

Tabel 3.4 – Isu strategis, Tujuan dan Sasaran

No	Isu Strategis (Masalah yang dihadapi)	Tujuan Terkait (Kondisi yang ingin dicapai)	Sasaran Terkait (Target terukur)
1	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kompetensi ASN, Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Tujuan RBK: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan profesionalisme ASN, dan memastikan akuntabilitas kinerja.	Sasaran RBK: Tercapainya opini WTP, meningkatnya nilai SAKIP, dan terlaksananya 100% program RB di unit kerja/desa.
2	Kualitas pelayanan publik belum optimal	Tujuan 1: Meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan yang cepat, transparan, dan akuntabel.	Sasaran 1: Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan dengan tingkat kepuasan masyarakat di atas 90%.
3	Koordinasi pembangunan antar desa belum terintegrasi	Tujuan 4: Meningkatkan efektivitas koordinasi pembangunan antara pemerintah kecamatan, desa, dan lembaga kemasyarakatan.	Sasaran 4: Tersedianya data dan informasi pembangunan kecamatan yang akurat dan terintegrasi.
4	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah	Tujuan 3: Memperkuat kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dalam pembangunan berbasis potensi lokal.	Sasaran 3: Meningkatnya kapasitas aparatur desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
5	Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat belum stabil	Tujuan 2: Memantapkan ketertiban dan ketertiban umum serta koordinasi penanganan permasalahan sosial kemasyarakatan.	Sasaran 2: Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat melalui peningkatan peran linmas dan koordinasi keamanan.
6	Infrastruktur dasar antar desa belum memadai	Secara tidak langsung mendukung semua tujuan utama, terutama efektivitas pelayanan publik dan ekonomi lokal.	Target infrastruktur akan didetailkan dalam program prioritas di Bab IV.

Analisis keterkaitan ini berfungsi untuk memastikan adanya hubungan logis dan konsisten antara kondisi yang ingin dicapai (Tujuan dan Sasaran) dengan permasalahan utama yang dihadapi (Isu Strategis). Hubungan ini sangat penting sebagai dasar penentuan arah kebijakan dan strategi pembangunan Kecamatan Kombeng Tahun 2026.

3.5 Arah kebijakan Pembangunan Kecamatan Kombeng Tahun 2026

Arah kebijakan pembangunan Kecamatan Kombeng Tahun 2026 ditetapkan berdasarkan isu strategis dan prioritas daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan, ketertiban masyarakat, dan penguatan kapasitas kelembagaan.

Arah kebijakan ini berfungsi sebagai koridor atau batasan dalam perumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Berikut adalah penjabarannya:

1. Penguatan tata kelola pemerintahan kecamatan yang efektif, transparan, dan berbasis digital.

Kebijakan ini merupakan landasan untuk mewujudkan birokrasi yang melayani dan responsif terhadap kebutuhan publik. Penjabaran operasionalnya mencakup:

- Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE): Mengintegrasikan layanan administrasi kependudukan, perizinan, dan surat menyurat menggunakan platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi tatap muka.
- Transparansi Anggaran dan Kinerja: Memastikan informasi publik terkait APBDes dan kinerja pemerintahan kecamatan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, salah satunya melalui website resmi atau papan informasi digital.
- Peningkatan Integritas Aparatur: Melaksanakan pembinaan etika dan peningkatan disiplin kerja untuk memastikan aparatur kecamatan bekerja secara profesional dan bebas dari pungutan liar (pungli).

2. Peningkatan peran kecamatan sebagai koordinator pembangunan wilayah dan pembina desa.

Kebijakan ini menekankan fungsi fasilitasi dan pengawasan kecamatan terhadap pemerintah desa. Penjabaran operasionalnya mencakup:

- Optimalisasi Fungsi Koordinasi: Menyelenggarakan forum komunikasi rutin antara Camat, Kepala Desa, BPD, dan stakeholder terkait untuk menyamakan persepsi dan mensinkronkan program pembangunan.

- **Pembinaan Administrasi Desa:** Memberikan bimbingan teknis dan pendampingan intensif kepada aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa, penyusunan RPJMDes, dan pelaporan keuangan yang akuntabel.
 - **Penguatan Pengawasan:** Meningkatkan fungsi pengawasan melekat terhadap pelaksanaan kegiatan di desa untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan sosial dan ekonomi berbasis potensi lokal.

Kebijakan ini bersifat transformatif, bertujuan untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia di Kecamatan Kombeng. Penjabaran operasionalnya mencakup:

- **Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif:** Memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan produk unggulan lokal (misalnya, hasil perkebunan, kerajinan) melalui pelatihan, fasilitasi perizinan PIRT, dan bantuan alat produksi.
 - **Pemberdayaan Kelompok Rentan:** Memberikan perhatian khusus pada kelompok perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas melalui program bantuan sosial dan peningkatan akses layanan dasar.
 - **Peningkatan Akses Kesehatan dan Pendidikan:** Berkolaborasi dengan dinas terkait untuk memastikan ketersediaan tenaga medis, fasilitas kesehatan dasar (Puskesmas Pembantu), dan bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
4. Pemantapan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat secara partisipatif.

Kebijakan ini berfokus pada jaminan rasa aman dan nyaman bagi warga, dengan menekankan peran serta aktif dari komunitas lokal. Penjabaran operasionalnya mencakup:

- **Penguatan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling):** Mendorong desa-desa untuk mengaktifkan kembali Siskamling dan memberikan dukungan sarana prasarana dasar.
- **Kesiapsiagaan Bencana:** Membentuk dan melatih Desa Tangguh Bencana (Destana) serta meningkatkan koordinasi dengan BPBD dalam upaya mitigasi dan penanganan darurat bencana alam.

- Penyelesaian Konflik Sosial: Mengoptimalkan peran forum perdamaian dan lembaga adat dalam penyelesaian konflik di tingkat lokal secara musyawarah mufakat.
5. Peningkatan infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang aktivitas pemerintahan dan sosial kemasyarakatan.

Kebijakan ini merupakan dukungan fisik untuk memastikan kelancaran roda pemerintahan dan mobilitas warga, terutama mengingat kondisi geografis Kecamatan Kombeng yang mungkin menantang. Penjabaran operasionalnya mencakup:

- Pembangunan dan Pemeliharaan Akses Jalan: Mengajukan usulan prioritas pembangunan dan pemeliharaan jalan penghubung antar desa dan kecamatan kepada pemerintah kabupaten/provinsi.
- Peningkatan Sarana Prasarana Kantor: Memastikan fasilitas kantor camat dan balai desa memadai untuk mendukung pelayanan publik, termasuk akses internet yang stabil.
- Penyediaan Air Bersih dan Listrik: Mengadvokasi ketersediaan layanan dasar listrik dan air bersih yang merata di seluruh wilayah kecamatan, berkoordinasi dengan PLN dan PDAM setempat.

Arah kebijakan pembangunan Kecamatan Kombeng Tahun 2026 ditetapkan berdasarkan isu strategis dan prioritas daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan, ketertiban masyarakat, dan penguatan kapasitas kelembagaan.

Tabel 3.5 - Matriks Keterkaitan Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Kecamatan Kombeng Tahun 2026

No	Isu Strategis (Kondisi Saat Ini)	Tujuan & Sasaran Terkait	Arah Kebijakan (Respons Strategis)
1	Kualitas pelayanan publik belum optimal (SDM, sarana, jaringan terbatas)	Tujuan 1: Meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Sasaran 1: Tingkat kepuasan masyarakat di atas 90%.	1. Penguatan dan percepatan implementasi Reformasi Birokrasi (RB) serta SPBE. 6. Peningkatan dan pemerataan infrastruktur pelayanan dasar.
2	Optimalisasi Pelaksanaan RB, Peningkatan Kompetensi ASN,	Tujuan RBK: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	1. Penguatan dan percepatan implementasi

No	Isu Strategis (Kondisi Saat Ini)	Tujuan & Sasaran Terkait	Arah Kebijakan (Respons Strategis)
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja belum maksimal	dan meningkatkan profesionalisme ASN. Sasaran RBK: Tercapainya opini WTP dan meningkatnya nilai SAKIP/IRB.	Reformasi Birokrasi (RB) serta SPBE. 2. Peningkatan profesionalisme dan kompetensi ASN serta aparatur desa secara berkelanjutan.
3	Koordinasi pembangunan antar desa belum terintegrasi (data tumpang tindih)	Tujuan 4: Meningkatkan efektivitas koordinasi pembangunan antar desa. Sasaran 4: Tersedianya data pembangunan yang akurat dan terintegrasi (single database).	3. Peningkatan peran kecamatan sebagai koordinator pembangunan wilayah dan pembina desa.
4	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah (kurangnya fasilitas informasi)	Tujuan 3: Memperkuat kapasitas dan kemandirian masyarakat desa. Sasaran 3: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan sosial dan ekonomi lokal.
5	Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat belum stabil (minim fasilitas keamanan)	Tujuan 2: Memantapkan ketentraman dan ketertiban umum. Sasaran 2: Meningkatnya ketertiban melalui peran Linmas dan koordinasi keamanan.	4. Pemantapan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat secara partisipatif.

3.6 Strategi Pencapaian

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, strategi pembangunan Kecamatan Kombeng Tahun 2026 difokuskan pada lima pilar utama, yang masing-masing dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi Tata Kelola

Optimalisasi sistem administrasi kecamatan berbasis digital dan peningkatan kapasitas aparatur.

Strategi ini berfokus pada modernisasi birokrasi kecamatan agar lebih responsif, efisien, dan transparan. Implementasinya meliputi:

- Penerapan e-Government: Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pelayanan administrasi terpadu berbasis elektronik (seperti perizinan online, surat menyurat digital) untuk mengurangi birokrasi tatap muka dan mempercepat waktu layanan.
- Peningkatan Kompetensi SDM: Melaksanakan program pelatihan berkala bagi aparatur kecamatan dan desa, khususnya dalam pengoperasian teknologi informasi, manajemen keuangan desa, dan hukum administrasi.
- Akuntabilitas Kinerja: Menerapkan sistem pengukuran kinerja berbasis Key Performance Indicators (KPI) yang terukur dan pelaporan keuangan yang akuntabel.

2. Strategi Sosial dan Kemasyarakatan

Pembinaan kelembagaan masyarakat, peningkatan kesadaran hukum, dan penguatan ketahanan sosial.

Strategi ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas sosial, keamanan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Implementasinya meliputi:

- Revitalisasi Linmas dan Siskamling: Mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling) berbasis desa dan memberikan pelatihan serta fasilitas pendukung bagi Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas).
- Penyuluhan Hukum dan HAM: Berkolaborasi dengan aparat penegak hukum (Polsek, Koramil, Kejaksaan) untuk menyelenggarakan sosialisasi hukum secara rutin kepada masyarakat dan aparatur desa.
- Fasilitasi Forum Kewargaan: Mendukung aktivitas lembaga kemasyarakatan seperti PKK, Karang Taruna, dan lembaga adat untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan sosial di tingkat lokal.

3. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Fasilitasi usaha mikro, pemberdayaan kelompok perempuan, serta peningkatan sinergi dengan desa.

Strategi ini diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari bawah, memanfaatkan potensi spesifik Kecamatan Kombeng. Implementasinya meliputi:

- Pelatihan Kewirausahaan: Menyelenggarakan bimbingan teknis (Bimtek) dan pelatihan keterampilan (misalnya, pengolahan hasil perkebunan/pertanian, kerajinan lokal) bagi pelaku UMKM dan kelompok perempuan (PKK).
- Akses Permodalan: Memfasilitasi akses UMKM ke sumber permodalan (KUR Bank Rakyat Indonesia/BRI, BUMDes) dan pendampingan pemasaran produk, termasuk pemasaran digital.
- Penguatan BUMDes: Mendorong pembentukan dan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak ekonomi di tingkat desa yang berorientasi pada potensi lokal.

4. Strategi Koordinasi Wilayah

Penguatan forum komunikasi antar desa serta sinkronisasi program pembangunan lintas sektor.

Strategi ini bersifat koordinatif, memastikan alokasi sumber daya efektif dan efisien tanpa tumpang tindih program antara desa dan kecamatan. Implementasinya meliputi:

- Optimalisasi Musrenbang: Menjamin proses Musrenbang partisipatif dari tingkat dusun hingga kecamatan, memastikan semua aspirasi terakomodasi dan tersinkronisasi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten.

- Rapat Koordinasi Rutin: Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Camat dengan Kepala Desa, BPD, dan tokoh masyarakat secara periodik untuk evaluasi progres pembangunan dan penyelesaian isu lintas desa.
- Sistem Data Terpadu: Mengembangkan Single Data Base pembangunan kecamatan yang dapat diakses oleh semua stakeholder untuk referensi perencanaan yang akurat.

5. Strategi Infrastruktur dan Lingkungan

Mendorong kolaborasi pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas lingkungan.

Strategi ini mengakui keterbatasan anggaran kecamatan dan menekankan pentingnya kerjasama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama mengingat kondisi geografis Kecamatan Kombeng. Implementasinya meliputi:

- Advokasi Anggaran: Melakukan advokasi dan sinkronisasi program pembangunan infrastruktur dasar (jalan desa/kecamatan, jembatan, listrik, air bersih) kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/Provinsi terkait.
- Pemeliharaan Rutin: Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur skala kecil di desa melalui kegiatan gotong royong.
- Manajemen Lingkungan: Mendorong praktik pembangunan yang ramah lingkungan, termasuk pengelolaan sampah dan mitigasi bencana alam (misalnya, pencegahan Karhutla), berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Arah Umum Rencana Kerja Tahun 2026

Rencana program dan kegiatan Kecamatan Kombeng Tahun 2026 merupakan penjabaran dari arah kebijakan, tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan dalam Bab III. Penyusunan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Timur, serta kemampuan pendanaan daerah.

Fokus pembangunan Kecamatan Kombeng Tahun 2026 diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan koordinasi pemerintahan desa, serta pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Berdasarkan isu strategis dan tujuan pembangunan, ditetapkan prioritas pembangunan Kecamatan Kombeng Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan
Melalui digitalisasi administrasi pemerintahan, peningkatan kapasitas aparatur, dan optimalisasi pelayanan terpadu.
2. Pemantapan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
Dengan penguatan koordinasi keamanan, pembinaan linmas, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat, penguatan kelembagaan desa, serta pelatihan ekonomi produktif berbasis potensi lokal.
4. Penguatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Wilayah
Melalui forum komunikasi antar desa dan penyediaan data pembangunan berbasis wilayah.
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pemerintahan Kecamatan
Meliputi perbaikan fasilitas kantor, pengadaan sarana kerja, serta pemeliharaan aset daerah.

4.2 Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Indikator Kinerja Tahun 2026

Berikut rencana program dan kegiatan Kecamatan Kombeng Tahun 2026 sesuai dengan klasifikasi dan nomenklatur yang diatur dalam Permendagri 90 Tahun 2019 (Lampiran Perubahan 2024) dan Permendagri 10 Tahun 2025.

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KANTOR CAMAT KOMBENG KAB. KUTAI TIMUR
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KANTOR CAMAT KOMBENG						6.537.947.200,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						6.537.947.200,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						6.537.947.200,00							0,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	-			50 % 77	5.634.532.200,00						-	0,00	
		[MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. KOMBENG]	Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP	76.50 81	67.65 75	67.65 76	70.50 77	5.634.532.200,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			6 Dokumen	33.340.000,00			-	4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Pegawai Kantor Camat Kombeng	-	0,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	16.510.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Pegawai Kantor Camat Kombeng		0,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	16.830.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Pegawai Kantor Camat Kombeng		0,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			2 Laporan	5.085.602.200,00			-	4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Kantor Camat Kombeng	-	0,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				49 Orang/bulan	5.037.947.200,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Kantor Camat Kombeng		0,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	39.240.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Kantor Camat Kombeng		0,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	8.415.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Kantor Camat Kombeng		0,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			6 Laporan	8.415.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Kantor Camat Kombeng	-	0,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	8.415.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Kantor Camat Kombeng		0,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			3 Laporan	20.000.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Pegawai Kantor Camat Kombeng	-	0,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Pegawai Kantor Camat Kombeng		0,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Pegawai Kantor Camat Kombeng		0,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			3 Laporan	254.175.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Kantor Camat Kombeng	-	0,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	25.760.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Kantor Camat Kombeng		0,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	220.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Kantor Camat Kombeng		0,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	8.415.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Kantor Camat Kombeng		0,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			2 Laporan	210.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Kantor Camat Kombeng	-	0,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	54.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Kantor Camat Kombeng		0,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	156.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Kantor Camat Kombeng		0,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			1 Laporan	23.000.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Kantor Camat Kombeng	-	0,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	13.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Kantor Camat Kombeng		0,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	10.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Kantor Camat Kombeng		0,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Masyarakat yang dilayani	-			76 %	40.000.000,00						-	0,00	
		[MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN KOMBENG]	Persentase Masyarakat yang dilayani	80	70	75	76	40.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			1 Laporan	30.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Masyarakat di Lingkungan Kecamatan Kombeng	-	0,00	KANTOR CAMAT KOMBENG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				3 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Masyarakat di Lingkungan Kecamatan Kombeng		0,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	-			1 Laporan	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Masyarakat di Lingkungan Kecamatan Kombeng	-	0,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Masyarakat di Lingkungan Kecamatan Kombeng		0,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Usulan Masyarakat yang diakomodir	-			74 %	570.000.000,00						-	0,00	
		[MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN KOMBENG]	Presentase Usulan Masyarakat yang diakomodir	81	70	72	74	570.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				200 Keluarga	150.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Desa-Desa di Lingkungan Kecamatan Kombeng		0,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				400 Keluarga	100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Desa-Desa di Lingkungan Kecamatan Kombeng		0,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				300 Keluarga	100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Desa-Desa di Lingkungan Kecamatan Kombeng		0,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				200 Keluarga	150.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Desa-Desa di Lingkungan Kecamatan Kombeng		0,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum	-			100 %	28.415.000,00						-	0,00	
		[MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN KOMBENG]	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	0	0	100	28.415.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	-			1 Laporan	28.415.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Masyarakat di Lingkungan Kecamatan Kombeng	-	0,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Masyarakat di Lingkungan Kecamatan Kombeng		0,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>				1 Laporan	8.415.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Masyarakat di Lingkungan Kecamatan Kombeng		0,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan</i>	-			73 %	220.000.000,00						-	0,00	
		[MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KOMBENG]	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan	80	70	72	73	220.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	"Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah "	-			3 Laporan	220.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Masyarakat di Lingkungan Kecamatan Kombeng	-	0,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				300 Orang	160.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Masyarakat di Lingkungan Kecamatan Kombeng		0,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				80 Orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Masyarakat di Lingkungan Kecamatan Kombeng		0,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Kompong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	Masyarakat di Lingkungan Kecamatan Kompong		0,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	-			76 %	45.000.000,00						-	0,00	
		[MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN KOMBENG]	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	80	71	73	76	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			3 Laporan	45.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Desa di Lingkungan Kecamatan Kompong	-	0,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Kompong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Desa di Lingkungan Kecamatan Kompong		0,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Desa di Lingkungan Kecamatan Kombeng		0,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Desa di Lingkungan Kecamatan Kombeng		0,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
		-	-	-	-	-	-	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah	Desa di Lingkungan Kecamatan Kombeng		0,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	J U M L A H							6.537.947.200,00							0,00	

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bersifat operasional dan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah selama satu tahun anggaran. Beberapa catatan strategis yang perlu diperhatikan dalam implementasinya adalah:

1. **Konsistensi Perencanaan:** Seluruh program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang tertuang dalam dokumen ini telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026, sehingga pelaksanaannya harus tetap menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan realisasi fisik.
2. **Optimalisasi Sumber Daya:** Mengingat keterbatasan pagu indikatif, Kecamatan Kombeng dituntut untuk melakukan skala prioritas dalam penggunaan anggaran, dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik (PATEN) dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. **Sinergitas Kewilayahan:** Keberhasilan Renja ini sangat bergantung pada sinergi antara Pemerintah Kecamatan, Perangkat Daerah terkait di tingkat Kabupaten, serta koordinasi aktif dengan 6 (enam) desa di wilayah Kecamatan Kombeng guna memastikan efektivitas pembangunan di tingkat tapak.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Guna menjamin akuntabilitas dan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. **Pedoman Pelaksanaan Anggaran:** Renja Kecamatan Kombeng Tahun 2026 menjadi dasar tunggal dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026 melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI.
2. **Kepatuhan Regulasi:** Pelaksanaan program dan kegiatan wajib mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari aspek teknis operasional maupun administrasi keuangan untuk meminimalisir risiko hukum.
3. **Mitigasi Perubahan:** Apabila dalam perjalanannya terdapat kebijakan strategis

nasional atau daerah yang bersifat mendesak (*force majeure*), maka pergeseran atau perubahan kegiatan dilakukan melalui mekanisme Perubahan Renja sesuai ketentuan yang berlaku.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai langkah konkret pasca penetapan dokumen ini, Pemerintah Kecamatan Kombeng akan melaksanakan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Internalisasi Kinerja: Melakukan sosialisasi dokumen Renja kepada seluruh aparatur di lingkungan Kantor Camat Kombeng agar memiliki pemahaman yang sama mengenai target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2026.
2. Monitoring dan Evaluasi Berkala: Melaksanakan pengawasan internal secara triwulanan terhadap capaian indikator kinerja utama dan realisasi penyerapan anggaran untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan sejak dini.
3. Pelaporan Capaian: Hasil pelaksanaan Renja ini akan menjadi bahan utama dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Camat dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kombeng tahun 2026.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Kombeng Tahun 2026 ini disusun. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Kombeng secara berkelanjutan.

Camat Kombeng,

JUMRAN, S.E., M.Si
Pembina TK./IV.a
NIP.19731012 201001 1 004

nasional atau daerah yang bersifat mendesak (*force majeure*), maka pergeseran atau perubahan kegiatan dilakukan melalui mekanisme Perubahan Renja sesuai ketentuan yang berlaku.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai langkah konkret pasca penetapan dokumen ini, Pemerintah Kecamatan Kombeng akan melaksanakan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Internalisasi Kinerja: Melakukan sosialisasi dokumen Renja kepada seluruh aparatur di lingkungan Kantor Camat Kombeng agar memiliki pemahaman yang sama mengenai target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2026.
2. Monitoring dan Evaluasi Berkala: Melaksanakan pengawasan internal secara triwulanan terhadap capaian indikator kinerja utama dan realisasi penyerapan anggaran untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan sejak dini.
3. Pelaporan Capaian: Hasil pelaksanaan Renja ini akan menjadi bahan utama dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Camat dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Kombeng tahun 2026.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Kombeng Tahun 2026 ini disusun. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Kombeng secara berkelanjutan.

Camat Kombeng,

JUMBAN, S.E., M.Si
Pembina TK./IV.a
NIP.19731012 201001 1 004